



PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033

Lebih Dekat dengan Satu Klik



KEBAKARAN DI PABRIK SMELTER NIKEL

**SATU KORBAN TEWAS TERJEBAK,
1 WNA LUKA BAKAR
BACA HALAMAN 2-3**



**DINKES KALTIM
SUSUN RENSTRA 2024-2026**



**KOMPAK BISNIS
SABU, PASUTRI DI
PASER MASUK BUI
BACA HALAMAN 27**

Kebakaran di Pabrik Smelter Nikel

Satu Korban Tewas Terjebak, 1 WNA Luka Bakar

SANGASANGA - Kebakaran hebat melanda Pabrik Smelter Nikel di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada Rabu, 11 Oktober 2023 sore.

Kejadian tragis ini mengakibatkan satu pekerja asing mengalami luka bakar serius dan satu orang tewas terjebak dalam kobaran api.

Identitas lengkap pekerja asing yang menjadi korban luka bakar serius masih belum diketahui, namun hingga berita ini diturunkan, korban masih menjalani perawatan medis di RUSD AW Sjachranie Samarinda.

Rahmat Hidayat, Lurah Pendingin, mengonfirmasi korban luka bakar diperkirakan mencakup sekitar 50 persen dari tubuhnya saat terjebak dalam kebakaran yang terjadi di salah satu gedung Pabrik Smelter Nikel. Insiden ini terjadi di dalam gedung boiler pembakaran batu bara, yang merupakan sumber energi utama di smelter tersebut.

Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran belum dapat dipastikan, dan Rahmat belum bersedia memberikan komentar lebih lanjut mengenai hal tersebut.

SATU TEWAS TERJEBAK

Setelah seorang pekerja asing mengalami luka bakar serius dan dibawa ke Rumah Sakit AW Sjachranie di Samarinda, petugas berhasil menemukan satu korban tewas di lokasi kebakaran.





Lurah Pendingin, Rahmat Hidayat, mengkonfirmasi penemuan korban tewas tersebut, meskipun identitasnya belum dapat diketahui untuk sementara. Jasad korban sudah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit AWS di Samarinda.

Kebakaran ini terjadi di bagian gedung penampungan batu bara pabrik, yang juga merupakan lokasi pembakaran batu bara. Kejadian ini

terjadi sekitar pukul 17.30 WITA. Dari berbagai video dan foto yang beredar di media sosial, terlihat kobaran api yang membesar di lokasi pabrik, serta upaya pemadaman sedang berlangsung.

Kejadian kebakaran ini telah mengejutkan masyarakat, dan banyak netizen di media sosial menyampaikan dukacita atas kejadian ini. Beberapa juga mengkritik kurangnya

respons terhadap keselamatan di area lokasi kebakaran.

Pihak berwenang dan perusahaan terkait masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran ini.

Pewarta: Rafii

Editor: Agus Susanto



GEDUNG BARU: Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum kembali meninjau progress pembangunan gedung baru Setdaprov, Rabu (10/10).

Gubernur Harapkan Kantor Baru Dapat Dimanfaatkan Secara Maksimal

TANJUNG SELOR - Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., kembali meninjau progress pembangunan gedung baru Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) yang berlokasi di Jalan Kolonel Soetadji, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Selasa (10/10).

Dalam peninjauan Gubernur berdiskusi dengan pekerja, juga mengecek pembangunan ruangan yang berada

di lantai 3 dan 4 yang akan segera ditempati dalam waktu dekat ini.

Gubernur Zainal berharap agar segala aspek pendukung pembangunan gedung diperhatikan, supaya nantinya bangunan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Gubernur meminta agar pihak kontraktor menyelesaikan pembangunan gedung baru Setprov Kaltara sesuai dengan target yang telah di-

tentukan.

"Kita berharap kendala lainnya dapat diatasi oleh pihak kontraktor sehingga tidak akan terjadi keterlambatan dalam proses penyelesaian," tegas Zainal Paliwang.

Diketahui bahwa pengerjaan Gedung Sekretariat Pemprov Kaltara saat ini merupakan pengerjaan tahap ke-9, dan dipastikan akan selesai pada tahun depan. **(dkisp)**



PENUTUPAN: Wagub Kaltara, Dr Yansen TP, M.Si menyaksikan penutupan Festival Sungai Kayan belum lama ini.

Geliat Ekonomi Masyarakat Meningkat

TANJUNG SELOR – Ragam kegiatan tengah digelar untuk menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 Bulungan dan ke-233 Tanjung Selor tahun 2023 di Tanjung Selor yang mana puncak hari jadi ini pada 12 Oktober setiap tahunnya.

Kehadiran berbagai kegiatan pada hari jadi daerah ini pun membuat geliat ekonomi masyarakat kian meningkat. Terpantau, ada ribuan kegiatan usaha yang dilakukan di sepanjang bantaran Sungai Kayan, Tanjung Selor Ibu Kota Kaltara.

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr Yansen TP, M.Si mengaku mengapresiasi dan mendorong serta mendukung sejumlah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan pada hari jadi Bulungan dan Tanjung Selor tahun ini.

“Ini merupakan potensi besar yang dapat menopang kehidupan masyarakat dan juga menopang peluang pembangunan ke depan,” ujar Yansen.

Ia menyebutkan ini sebagai peluang karena dari semua kegiatan yang dilakukan pada kegiatan ini tentu ada banyak dampak yang bisa menghadirkan kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Saya melihat Festival Sungai Kayan tahun ini sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Baik itu dari pesertanya, maupun beragam kegiatan ikutannya sudah cukup baik,” katanya.

Seperti lomba perahu dayung, misalnya. Tahun ini pesertanya cukup banyak dan terbagi beberapa kelas, mulai dari muatan 20 orang hingga 50 orang. Tentu diharapkan kegiatan seperti ini dapat terus dipertahankan untuk dilaksanakan setiap tahun.

“Selama kegiatan ini, seluruh pelaku kegiatan di bantaran Sungai Kayan ini sudah mencapai lebih dari 3.600 orang. Tentu ini menimbulkan dampak yang besar, di antaranya kehadiran penonton yang membuat ekonomi rakyat bertumbuh,” tuturn-

ya.

Oleh sebab itu, pihaknya dari Pemprov Kaltara sangat mendukung untuk pemanfaatan potensi Sungai Kayan ini. Menurutnya ini merupakan peluang yang besar bagi daerah untuk meningkatkan pembangunan melalui potensi Sungai Kayan.

Harapannya, ke depan kegiatan seperti ini harus bisa lebih permanen. Bisa saja selain balap perahu dayung, ke depannya kontestasi lain bisa dilakukan di Sungai Kayan ini, misalnya seperti lomba perahu hias dan lain-lain.

“Kalau di pemerintahan itu ada beberapa OPD (organisasi perangkat daerah) yang menaungi ini, dan sejumlah OPD ini saya rasa bisa menggunakan potensi sungai untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Ke depan kita harap bisa lebih bijak menggunakan potensi sungai ini supaya bisa meningkatkan akselerasi pembangunan,” tuntasnya. **(dkisp)**

1. Inspektur Daerah
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Dinas Komunikasi dan Informatika
4. Dinas Ketenagakerjaan
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
8. Dinas Kesehatan
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
11. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
14. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
15. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Lingkungan Hidup
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
20. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
21. Badan Pendapatan Daerah
22. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
23. Satuan Polisi Pamong Praja
24. Badan Penanggulangan Bencana Alam
25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
26. Sekretaris DPRD
27. Camat Bontang Selatan
28. Camat Bontang Utara
29. Camat Bontang Barat
30. Lurah Tanjung Laut
31. Lurah Tanjung Laut Indah
32. Lurah Berbas Tengah
33. Lurah Berbas Pantai
34. Lurah Bontang Lestari
35. Lurah Satimpo
36. Lurah Kanaan
37. Lurah Gunung Telihan
38. Lurah Belimbing
39. Lurah Bontang Baru
40. Lurah Bontang Kuala
41. Lurah Loktuan
42. Lurah Guntung
43. Lurah Api-Api
44. Lurah Gunung Elai



DIRGAHAYU KOTA BONTANG



Basri Rase S.IP, M.Si
Walikota



Hj. Najirah, S.E
Wakil Walikota





Keluarga Besar RSUD Taman Husada Mengucapkan

Dirgahayu Kota Bontang



Bontang
Terus Bergerak
Untuk Bontang Lebih Hebat



Basri Rase, S.IP, M.Si
Wali Kota Bontang



Hj. Najirah, SE
Wakil Wali Kota Bontang



dr. Suhardi, Sp.JP, FIHA
Direktur RSUD Taman Husada



0815 456 0006



Rsud Taman Husada



rsudbontang



rsud.bontangkota.go.id



RAFI'I/MEDIA KALTIM

Bupati Kukar, Edi Damansyah.

Buka Pekan Inovasi dan Kreativitas, Bentuk Reformasi Birokrasi Perubahan

TENGGARONG- Pekan Inovasi dan Kreativitas tahun 2023 di lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara (Setkab Kukar), resmi dibuka oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah, pada Rabu (11/10/2023) di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar. Turut hadir seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga kecamatan di Kukar.

Edi Damansyah menjelaskan setiap OPD, kecamatan hingga kelurahan dan desa mampu menciptakan program inovasi. Agenda inilah dianggap menjadi dorongan, untuk bisa menciptakan reformasi

birokrasi perubahan. "Ini bagian dari perbaikan inovasi lah di Kukar," ujar Edi Damansyah.

Dilanjutkan Edi, nantinya setiap inovasi yang diciptakan, akan dinilai secara independen. Inovasi mana saja yang sudah sesuai dengan kaidah. Dan nantinya mendapatkan predikat terbaik ditingkat kabupaten. Untuk kemudian diikutsertakan di tingkat provinsi dan nasional.

Terbukti, banyak inovasi yang sudah dilakukan jajaran Pemkab Kukar yang berhasil menyabet penghargaan di provinsi hingga nasional. Seperti sebelumnya Badan Pendapa-

tan Daerah (Bapenda) Kukar yang berhasil menyabet peringkat pertama di tingkat Kaltim dalam digitalisasi pelayanan pajak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Juga beberapa inovasi yang berhubungan dengan sektor pertanian, kepemudaan. Tidak sedikit yang sudah mencapai level nasional.

"Bingkai besarnya reformasi birokrasi perubahan, jadi sistemnya birokrasi perubahan terus dilakukan inovasi," tutup Edi. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari

Dapat Jatah DBH Sawit, Dimanfaatkan untuk Infrastruktur Kelapa Sawit Milik Rakyat

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mendapatkan jatah dari Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit dari pemerintah pusat. Dana ini disalurkan melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersama 9 kabupaten dan kota lainnya di Kaltim.

Kukar sendiri mengantongi DBH kelapa sawit sebesar Rp 19,7 miliar. Di bawah Kutai Timur (Rp 37,4 miliar), Berau (Rp 20,5 miliar) dan Paser (Rp 20,3 miliar). Kemudian Kutai Barat (Rp 17,8 miliar), Samarinda (Rp 11,8 miliar), PPU (Rp 11,6

miliar), Mahakam Ulu (Rp 8,7 miliar), Bontang (Rp 7 miliar) dan Balikpapan (Rp 6,9 miliar).

Sementara untuk Pemprov Kaltim mengantongi Rp 45 miliar, sehingga total Kaltim mendapatkan jatah Rp 205,5 miliar dari pemerintah pusat.

"Di dalam pedoman Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) sudah jelas penggunaannya, itu ada aturan penggunaannya," ungkap Edi Damansyah, bupati Kukar, belum lama ini.

Edi melanjutkan, anggaran DBH tersebut akan digunakan untuk pembangunan di kawasan kebun sawit, terutama kawasan kelapa sawit mi-

lik rakyat. Terutama untuk pembangunan infrastruktur jalan kawasan sawit yang berada di kecamatan penghasil kelapa sawit.

Dengan mengerahkan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar untuk pembangunan jalan utamanya, sementara jalan-jalan sekunder berupa blok-blok akan dikerjakan oleh Dinas Perkebunan (Disbun) Kukar. "Yang pasti kami fokuskan untuk infrastruktur perkebunan rakyat sesuai pedomannya," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari

Tingkatkan Kapasitas Ketua RT, Desa Batuah Gelar Bimtek Tata Kelola Administrasi



Kades Batuah, Abdul Rasyid

ISTIMEWA

TENGGARONG - Peningkatan kapasitas ketua Rukun Tetangga (RT) di Desa Batuah terus dilakukan. Salah satunya dengan melakukan bimbingan teknis (bimtek) dalam hal pengelolaan administrasi. Sebanyak 49 ketua RT dari 10 dusun, mengikuti rangkaian bimtek yang digelar di Hotel Maxone Balikpapan, Minggu (8/10/2023) lalu.

Kepala Desa (Kades) Batuah, Abdul Rasyid, dalam rangka bimtek ini, seluruh ketua RT bisa lebih serius lagi dalam menjalankan tata kelola administrasinya dengan lebih baik lagi. Terutama dalam hal melayani warganya.

"Mari kita buktikan dengan bekerja dengan kinerja baik. Terus jaga kekompakan dan kebersamaan untuk tegak lurus mendukung Program Dedikasi Kukar Idaman," ungkap Rasyid.

Bimtek ini pun menjadi suatu gerakan bersama, agar apa yang dilakukan ketua RT bisa berjalan bersama. Tidak ada ketua RT yang tertinggal dalam hal tata kelola administrasinya. Dapat memaksimalkan sistem kerja, dengan harapan bisa sejalan memaksimalkan pelayanan di masing-masing RT.

Banyak hal yang menjadi tugas ketua RT. Utamanya dalam hal pengelolaan program Rp 50 juta per RT. Selain itu juga, bagaimana mampu memahami tata kelola Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (BKKD). Ketika para ketua RT mampu menjalankan itu semua dengan baik, diyakini dampaknya terhadap warga sangat dirasakan. "Intinya, semuanya harus lebih baik," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



MERCURE

HOTEL

SAMARINDA

GASTRONOMY PACKAGE

Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 24 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 100 ribu di restoran Kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

Berlaku hingga 30 Desember 2023

SCAN BARCODE
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:



@mercure_samarinda



0811 - 551 - 6000

all.accor.com



Selamat Ulang Tahun
H. RENDI SOLIHIN

Wakil Bupati Kutai Kartanegara

- 11 Oktober 2023 -





Mahasiswa Universitas Mulia saat medatangi Komisi III DPRD Balikpapan.

Universitas Mulia Audensi ke Komisi III DPRD Balikpapan, Bahas Permasalahan DAS Ampal

BALIKPAPAN - Komisi III DPRD Kota Balikpapan menerima audensi puluhan mahasiswa dari Universitas Mulia Balikpapan di Ruang Komisi III DPRD Balikpapan. Kedatangan puluhan mahasiswan ini disambut Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan, Kamaruddin Ibrahim didampingi anggota Komisi III DPRD Balikpapan Mieke Henny, Nurhadi Saputra, Suwarni, Jafar Sidik.

Dari audensi ini, Kamaruddin Ibrahim menyampaikan, bahwa mahasiswa Fakultas Hukum ke kantor DPRD Balikpapan ingin mempertanyakan aspek hukum dan permasalahan DAS Ampal.

"Di sini kami jelaskan bagaimana tugas dan tupoksi dari DPRD, berkaitan dengan anggaran, pengawasan dan lain sebagainya," ujarnya, Rabu (11/10/2023).

Lebih lanjut Kamaruddin Ibrahim menjelaskan, dalam hal pengawasan DPRD bukan mengawasi hal-hal yang mikro. Tetapi lebih pengawasan perkara makro. Misalnya, jika ada kontraktor yang lambat dan mengalami deviasi, tentu DPRD akan turun.

"Jadi kami enggak ngawasi jumlah materialnya, supaya mereka paham," jelasnya.

Di pertemuan ini, mahasiswa lebih kritis menanggapi perihal masalah

hukum DAS Ampal. Tidak permasalahan hal tersebut, karena DPRD bekerja berdasarkan kolektif kolegial, sehingga tidak bisa mengambil keputusan sendiri.

"Karena yang berkaitan dengan operasional itu urusan dari eksekutif, legislatif hanya mengawasi secara umum. Kami bicara sesuai tugas saja, karena kami enggak mau terjebak dengan persoalan yang lainnya," tutupnya. **(ADV/DPRDBalikpapan/Bom)**

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari



RDP Komisi II DPRD Kota Balikpapan bersama Satpol PP dan Aliansi Penjual Eceran Minyak (APEM) Kota Balikpapan.

Komisi II RDP dengan APEM dan Pol PP, Pomini Diizinkan Berjualan Sementara Waktu

BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan melalui Komisi II menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Aliansi Penjual Eceran Minyak (APEM) Kota Balikpapan. RDP ini untuk mencari solusi terkait penertiban penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran khususnya penjual Pom Mini.

Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman mengatakan, bahwa sesuai dengan Undang-undang dan aturan yang berlaku keberadaan Pom Mini ini sebenarnya memang melanggar aturan.

Meski demikian, harus juga memikirkan perekonomian para pemilik usaha Pom Mini yang selama ini banyak membantu masyarakat yang kesulitan dalam menghadapi padatnya antrian di SPBU.

"Kami dari Komisi II, meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Balikpapan membiarkan dulu Pom Mini ini tetap berjualan, sembari mereka melakukan kajian dan menentukan regulasi juga sambil berkoordinasi dengan pihak Pertamina," ujarnya, Rabu (11/10/2023).

Lebih lanjut Taufik menjelaskan, akan ada Surat Edaran (SE) dan imbauan dari Satpol PP, melalui ko-

munitas APEM. "Jadi permasalahan ini sudah clear, bukan dibiarkan tapi nanti akan ada syarat-syarat yang akan diterapkan," jelasnya.

Taufik menegaskan, pihak Komisi II meminta adanya kajian dan koordinasi dengan Pertamina terkait dengan regulasi undang-undang dari pusat. Disisi lain keberadaan Pom Mini ini membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM karena padatnya antrian di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

"Apalagi ini juga menyangkut dengan piring nasi mereka, tetapi harus sesuai dengan aturan yang ada. Harus ikuti aturan dengan tidak mengesampingkan para pelaku Pom Mini ini," tambahnya.

Sementara Kepala Satpol PP Kota Balikpapan, Budi Liliono masih menunggu regulasi yang akan dibuat termasuk koordinasi dengan OPD lain tentang bagaimana keberlanjutan dari masalah tersebut.

Menurutnya, para pengusaha Pom Mini dilarang untuk berjualan di kawasan jalan protokol dan tidak boleh bertambah jumlah penjualannya.

"Untuk di daerah juga ada aturan untuk mengatur, tempat-tempat mana yang diperbolehkan untuk ke-

giatan jual beli. Kita akan mengkaji ulang tempat mana yang diperbolehkan, dengan catatan mereka jumlahnya tidak bertambah, dan tidak berjualan di jalan protokol," ujarnya.

Budi menambahkan, akan ada Surat Edaran atau Perwali yang akan mengatur keberadaan Pom Mini ini, sambil berkoordinasi dengan OPD yang lain seperti Dinas Perizinan dan BPBD.

Sementara Ketua APEM Balikpapan, Harianto menyebut mereka dibolehkan berjualan sambil menunggu aturan atau ketentuan yang akan dikeluarkan Pemerintah Kota, namun dengan catatan menjaga keamanan dan menyiapkan alat safety, minimal alat pemadam api ringan (APAR) atau pasir untuk mencegah adanya kebakaran atau adanya percikan api.

"Kami berharap aturan yang dikeluarkan Pemkot Balikpapan segera keluar, supaya kami usahanya lebih nyaman dan Pom Mini di Balikpapan tidak tumbuh semakin banyak. Kalau dibiarkan bisa tembus ribuan unit," ujarnya. (ADV/DPRDBalikpapan/Bom)

Pewartu : Aprianto
Editor : Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Ketua DPRD Bontang, Andi Faisal Sofyan Hasdam.

Ketua DPRD Harap Pj Gubernur Kaltim Perhatikan Kabupaten/Kota Secara Adil

BONTANG – Ketua DPRD Bontang, Andi Faisal Sofyan Hasdam mengapresiasi ditunjuknya Akmal Malik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) menggantikan Isran Noor yang menjabat sebelumnya.

Dengan dipilihnya Akmal, dirinya meminta agar Pj Gubernur Kaltim tersebut dapat menjalankan program-program yang ada dengan baik.

Ia juga meminta agar dapat memperhatikan kabupaten/kota di seluruh wilayah Kaltim dengan adil. Sehingga perhatian tersebut dapat merata di seluruh wilayah.

“Keadilan itu terutama pada bantuan-bantuan seperti keuangan dan lain sebagainya,” ujarnya singkat.

Dirinya juga mengharapkan agar

ada sinergi yang baik antara Pemerintah Provinsi dengan kabupaten/kota. Sehingga dengan sinergi tersebut dapat mempercepat kemajuan pembangunan di daerah-daerah.

Saat ditanya mengenai kompetensi Akmal, Andi Faiz sapaan akrabnya menyebut kompetensi Akmal sudah sangat mumpuni untuk memimpin Kaltim. Lantaran Akmal memiliki segudang pengalaman yang mumpuni di bidang pemerintahan. Akmal adalah seorang birokrat sarat pengalaman yang bertugas di bawah Kementerian Dalam Negeri.

“Kompetensinya tidak perlu diragukan lagi,” imbuhnya.

Diketahui, Karir Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik terbilang cukup cemerlang semenjak ia memulai karirnya

di Kemendagri pada 1996 yang lalu.

Akmal Malik pernah bertugas di Kanwil Kemendagri Provinsi Aceh sebagai Kabag Tata Usaha dan kepegawaian pada 2005-2008, dan dilanjutkan pada 2008 - 2012 menjabat sebagai Sekda Kabupaten Aceh Singkil.

Karirnya terus melejit hingga akhirnya pada 2019 ia menjabat Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Pada 13 Mei 2022 Akmal Malik ditunjuk sebagai Pj Gubernur Sulawesi barat oleh Mendagri Tito Karnavian menggantikan Gubernur Muhammad Ali Baal Masdar yang habis masa jabatannya.

Dengan bekal pengalaman itulah ia dipercaya untuk menggantikan jabatan Isran Noor sebagai Gubernur Kaltim saat ini. **(al/adv)**

Legislatif Minta Oknum Bermain Lapak Ditindaklanjuti

BONTANG – Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam menyebut bahwa lapak-lapak yang berada di pasar-pasar tradisional Bontang saat ini adalah milik pemerintah daerah, bukan pribadi. Sehingga tidak diperbolehkan menyalahgunakannya secara individu.

Hal itu diungkapkannya saat mengomentari adanya dugaan oknum memainkan lapak pasar. Lantaran banyak terdapat keluhan yang mengatakan bahwa take over (ambil alih lapak) di pasar harganya sangat mahal.

Dikatakan Politisi Partai Golkar tersebut, tidak ada aturan soal take over lapak di pasar. Sebab, kios pasar

yang dimiliki oleh para pedagang adalah milik pemerintah daerah setempat dan bukan milik pribadi pedagang.

“Sebenarnya itu tidak ada aturan soal take over. Bisa saja ada oknum, yang menempati saat ini jual Rp 10 juta, padahal dari pemerintah harganya Rp 1 juta misalnya,” tegasnya.

Karenanya dengan adanya informasi dugaan penyalahgunaan lapak tersebut, dirinya meminta OPD terkait untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut. Jangan sampai masalah ini terus berlarut.

“Maka itu saya setuju untuk segera ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, bahwa

para pedagang di pasar tradisional mengeluhkan soal mahalnya biaya balik nama (take over) lapak di dalam pasar. Alhasil banyak pedagang yang memilih berjualan di pinggir jalan.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Bontang, Sumaryono beberapa waktu lalu. Dirinya kerap mendapat keluhan dari pedagang terkait take over lapak.

“Kata pedagang harga balik nama lapak kosong yang mau ditempati pedagang lain, biayanya terlalu tinggi. Sampai-sampai ada yang Rp 10 juta,” ujarnya. (al/adv)



ISTIMEWA

Masjid Terapung Darul Irsyad Selambai.

Pondasi Masjid Terapung Ditabrak Perahu Nelayan, Pemkot Diminta Pasang Pagar Pembatas

BONTANG – Masjid Terapung Darul Irsyad Selambai, Loktuan, kurang mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Hal itu terbukti dengan kurangnya fasilitas pada masjid yang telah diresmikan dan difungsikan pada awal Maret 2022 lalu.

Hal itu disayangkan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Faisal.

Disebutkan Faisal, salah satu yang perlu diperhatikan dari Masjid Terapung ini adalah, tidak adanya fasilitas pengaman pagar pembatas di bagian bawah masjid.

Belum adanya fasilitas pengaman seperti pagar pembatas bagian bawah, dinilai Faisal bisa membahayakan. Sering menyebabkan perahu nelayan yang kerap melintas,

membentur pondasi masjid di bagian bawah. Apalagi saat malam hari.

“Masyarakat di sana mayoritasnya nelayan, ini harus diperhatikan. Karena ada bagian yang sempat tertabrak perahu nelayan pas malam hari. Kalau ada pengamanannya kan lebih aman para nelayan, konstruksi masjid juga lebih tahan lama,” tandasnya. (al/adv)



RDP Pembahasan Perum Korpri

Warga Perum Korpri Tolak Perpanjangan HGB Lahan

SAMARINDA - DPRD Kaltim meminta Pemprov Kaltim bersurat secara resmi ke Kemendagri untuk meminta jawaban resmi perihal masalah tanah Loa Bakung yang hampir sudah 30 tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Sapto Setyo Pramono, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan yang digelar di gedung DPRD Kaltim, Selasa (10/10).

"Solusinya seperti apa, harus bagaimana, nanti tergantung jawaban resminya. Pahit pun juga harus disampaikan begitu juga manis pun harus disampaikan. Sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan," kata Sapto.

Sapto juga mengatakan bahwa DPRD Kaltim akan membawa tiga perwakilan warga Loa Bakung untuk berkonsultasi secara langsung ke Kemendagri. Ia menambahkan bahwa

masalah akomodasi dan transportasi akan dibantu oleh anggota DPRD Kaltim.

"HGB ini kan sebenarnya bisa diperpanjang, hanya saja yang diminta diubah menjadi SHM. Memang di awal perjanjian secara aturan kronologis bahwa itu adalah Hak Pengelolaan Lahan, artinya dikelola lahannya tapi bukan untuk dimiliki. Dan itu bukan untuk PNS, tapi nggak tau ya apakah seluruh warga loa bakung itu 100 persen PNS atau sudah beralih kepada pihak yang lain," ujar Sapto.

Sementara itu, Ketua Forum Perempuan Peduli Perumahan Korpri Loa Bakung (FPPKLB) Neneng Herawati menolak untuk membayar perpanjangan HGB yang diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 35 tahun 2023. Ia menganggap hal itu sangat merugikan warga yang sudah 30 tahun tinggal di sana.

"Karena dalam pasal itu ada pembiayaan perpanjangan HGB 0,5 persen dikali dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang berjalan. Masyarakat sangat dirugikan, kami sudah 30 tahun di situ. Masa kita harus perpanjang-perpanjang terus. Itu sama dengan kami menyewa, padahal kita membeli," kata Neneng.

Neneng juga masih berharap dengan solusi hibah yang diatur dalam Perda nomor 3 tahun 2022. Ia berpendapat bahwa hibah itu bisa diberikan dengan cara untuk tujuan kemanusiaan, sosial, dan lain-lain.

"Untuk jadwal keberangkatan ke Kemendagri akan menyusul dari DPRD Kaltim," tutup Neneng. (adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
Jl. Biggen Kawana No. 116A, Sebelang Kiri, Bontang Barat, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

AUTO 2000
member of ASTRA

Urusan Toyota lebih mudah!

AYO IKUTI!!
LOMBA VIDEO PENDEK

TEMA
PERAN PUPR
MENDUKUNG INFRASTRUKTUR
DESTINASI WISATA

TOTAL HADIAH
33 JUTA RUPIAH

DAFTAR SEGERA

NARAHUBUNG / CP :
Heny 081254559928
Shinta 082256114744

SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA

1. Peserta lomba terbuka untuk umum dengan usia min 17 tahun (kuota terbatas 40 tim)
2. Peserta lomba berkelompok min 3 orang max 4 orang
3. Video merupakan video pendek berjenis video profil infrastruktur pariwisata Kota Bontang berdurasi max 3 menit dengan resolusi video min 1920x1080px
4. Peserta harus mengisi formulir pendaftaran melalui link : <https://forms.gle/xCaP8bLjtbdAYkhH7>
5. Video pendek bertema sesuai tema yang di tentukan
6. Peserta lomba hanya mengirim satu video pendek
7. Video belum pernah dilombakan dan dipublikasikan melalui media apapun
8. Video merupakan karya baru, original bukan hasil plagiat/mengambil sebagian hak cipta oranglain, apabila dikemudian hari terdapat gugatan hak cipta maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peserta lomba
9. Transportasi menuju 3 spot lokasi yang ditentukan oleh panitia dalam pengambilan video difasilitasi oleh dinas PUPR hanya 1 (Satu) hari
10. Video mencantumkan subtitle berbahasa Inggris
11. Video yang dikirimkan menjadi hak milik Dinas PUPR Kota Bontang
12. Wajib follow Instagram @ppid.dpuprbtg dan @bontang_tourism
13. Peserta tidak dipungut biaya apapun
14. Video tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, kesucilaan, moral, SARA, kekerasan, promosi produk komersial serta tidak mengandung unsur pornografi
15. Materi video dapat diterima panitia paling lambat tanggal 05 oktober 2023 pukul 23.59 wita melalui Email : dpupr25@gmail.com dan ke CP : SHINTA (082256114744)
16. Video yang dikirimkan berhak disiarkan atau ditayangkan oleh panitia untuk keperluan media edukasi dan promosi
17. Keputusan panitia dan dewan juri tidak dapat diganggu gugat
18. Informasi teknis lomba akan disampaikan pada technical meeting
19. Hal-hal yang belum diatur akan diinformasikan berikutnya.

Dalam rangka menyambut HUT Kota Bontang yang ke-24 dan mensukseskan Bontang Festival 77 Event. Dengan semangat "Energy of Bontang #sinergyandcollaboration". Dinas PUPR Kota Bontang mengadakan Lomba Video. Lomba ini hadir sebagai upaya Dinas PUPR turut berpartisipasi dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur destinasi wisata di Kota Bontang untuk memenuhi nilai-nilai Sapta Pesona (Aman Tertib Bersih Sejuk Indah Ramah Kenangan).

Catat Waktunya :

- 21-27 September 2023 Pendaftaran
- 29 September 2023 (pukul 09.00 wita Seremoni peluncuran lomba video dan pukul 14.00 wita Technical Meeting)
- 30 September 2023 (pukul 06.00 wita Spot Hunting di 3 lokasi
 - Karang Pasilan (Snorkling)
 - Kampung Malahing
 - Pulau Beras Basah
 - + additional : Pulau Segajah
- 12 Oktober 2023 (pukul 20.00 wita pengumuman pemenang secara "live" di acara Gala Dinner HUT Kota Bontang Ke-24 di Pendopo Rujab Walikota)



BPSDM Kaltim Gelar Acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H

SAMARINDA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H, bertempat di Aula Utama BPSDM Provinsi Kaltim, Selasa (10/10/23).

Agenda ini merupakan agenda rutin yang digelar oleh BPSDM Kaltim. Sebagai wadah ikhtiar untuk terus mengenang dan mencintai Nabi Besar Muhammad SAW tauladan umat Islam seluruh dunia.

Acara dirangkai dengan mendenangkan sari tilawah Qur'an dan dilanjutkan dengan ceramah keagamaan Islam, berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW.

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi mengajak kepada seluruh pegawai yang hadir untuk meneladani akhlak Rasulullah.

"Melalui peringatan ini harapan kita adalah semua bisa mengenang kembali sejarah perjuangan beliau. Dalam hal ini kita juga ingin mengambil pelajaran dari kegiatan ini terutama bagaimana kita bisa melihat sifat mulia yang juga merupakan momentum yang sangat baik untuk menjalin silaturahmi yang erat dan juga rasa kebersamaan," ucapnya.

Hal ini dibenarkan oleh Penceramah Guru Achmad Zaini. Ia menyampaikan, Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi setiap umat Islam di seluruh penjuru dunia. Setidaknya ada 4 amal atau kebiasaan yang bisa dilakukan sebagai pintu masuk menuju surga.

"Sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah telah memberikan beberapa penjelasan, yang akan menghantarkan kita menuju surga Allah SWT" ucap Guru Achmad Zaini.

Yang pertama yaitu menebar Salam, Orang yang menghendaki untuk masuk surga adalah mereka yang menebarkan salam, perdamaian dan kasih sayang. Menebarkan perdamaian bisa diawali dengan memberi ucapan salam kepada saudara kita.

Kedua yaitu Dermawan, Selain kita diwajibkan untuk mengeluarkan nafkah untuk keluarga, atau mengeluarkan zakat atas harta, Nabi menganjurkan bersedekah, terutama bagi orang yang membutuhkan.

"Mengapa memberikan makanan dapat menghantarkan kita menuju surga? Karena orang yang senang

memberikan makanan adalah orang yang dekat dengan surga." Ujar Beliau

Selanjutnya, yaitu menjalin silaturahmi kepada semua, dan yang keempat adalah menjalankan sholat sunnah di ujung waktu malam.

Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H ini diikuti seluruh jajaran Aparat Sipil Negara (ASN) yang ada di BPSDM Kaltim. **(Han/ADV/BPSDM)**

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari





Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Dra Nina Dewi .

Kepala BPSDM: Manajemen Bencana Jadi Tanggung Jawab Bersama

SAMARINDA - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Nina Dewi menjelaskan pentingnya manajemen bencana tidak dapat dianggap remeh. Karena menyangkut keselamatan nyawa umat manusia.

Hal ini disampaikan oleh Nina Dewi saat memberikan sambutan membuka Pelatihan Manajemen Bencana, di Aula Utama Kantor BPSDM Kaltim Jalan HM Rifadin Samarinda Seberang beberapa waktu lalu.

“Manajemen bencana tidak bisa diabaikan di seluruh dunia. Kita sering kali dihadapkan pada berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, dan banyak lagi. Selain itu, ada juga bencana buatan manusia seperti kecelakaan industri dan konstruksi,” ungkapnya. Mempersiapkan diri sejak dini, ujar

Nina sangat penting dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat dalam manajemen bencana adalah langkah yang bijak untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

“Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa manajemen bencana adalah tanggung jawab bersama. Semua individu, komunitas, dan pemerintah memiliki peran penting, dalam menjaga alam agar terhindar dari bencana alam,” ujarnya.

Ilmu pengetahuan tentang manajemen bencana diperlukan untuk berkontribusi secara positif dalam upaya manajemen bencana di wilayah kita masing-masing dan akan memberikan gambaran yang komprehensif bagi para peserta diklat mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia.

Nina yakin bahwa semua peserta akan keluar dari pelatihan ini dengan pengetahuan baru yang berharga dan perspektif yang lebih luas tentang manajemen bencana namun tidak kalah pentingnya. Dia juga tetap berharap bahwa pemerintah provinsi tidak akan pernah menghadapi situasi darurat serius nantinya.

“Namun, dengan persiapan yang baik, kita akan siap untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Saya berharap pelatihan dasar manajemen bencana ini akan menjadi langkah pertama dalam perjalanan kita untuk menjadikan masyarakat kita lebih aman dan lebih tangguh dalam menghadapi bencana,” tutupnya. (Han/ADV/BPSDM)

Pewartu : Hanafi
Editor : Nicha Ratnasari



Jajaran Prokopim Berau dan PWI Berau foto bersama di depan Monumen Pers Nasional.

Kunjungi Monumen Pers Nasional, Tingkatkan Kapasitas dan Kapabilitas

SOLO- Jajaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Berau bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Berau melakukan kunjungan ke Monumen Pers Nasional pada Rabu (11/10/2023).

Rombongan berangkat dari Kabupaten Berau melalui transportasi udara sekira pukul 08.25 Wita dan tiba di Surabaya pada pukul 10.40 WIB.

Setibanya di Kota Pahlawan, rombongan langsung menuju Kota Surakarta pada pukul 11.00 WIB untuk melakukan kunjungan ke Monumen Pers Nasional.

Cuaca terik menemani perjalanan menuju Surabaya-Solo, namun tak sedikitpun menyurutkan semangat rombongan untuk mengetahui sejarah terbentuknya PWI dan Monumen Pers Nasional.

Ketika tiba di Monumen Pers Nasional, Jalan Gajah Mada, Kota Surakarta, rombongan disambut dengan hangat oleh para pengurus. Tampak senyuman hangat terpancar di wajah mereka.

Ketua PWI Surakarta, Anas Syahirul, Sekretaris PWI Surakarta, Asep

Abdullah, Ketua DKD PWI Surakarta, Anjar Hari Wartono, mewakili Monumen Pers Nasional, Arnain mengarahkan rombongan menuju Ruang Audio Visual.

Di dalam, para pengurus menyajikan video sejarah Gedung Monumen Pers Nasional dan sejarah terbentuknya PWI Surakarta yang diketahui merupakan PWI tertua.

Video pun diputar, tampak raut wajah ingin tahu rombongan Prokopim Berau dengan PWI Berau mengenai sejarah yang ada di Monumen Pers Nasional tersebut.

Banyak hal menarik di dalamnya. Mulai awal mula berdirinya Gedung Monumen Pers Nasional, Alat yang digunakan wartawan dahulu untuk memperoleh berita, sejarah Radio "Kambing", nama-nama wartawan Jawa dahulu dan banyak hal lagi mengenai dunia pers Indonesia.

Dalam Gedung Monumen Pers Nasional, di gedung utama terdapat patung-patung wajah wartawan Jawa dahulu, Societeit Mangkunegaran dari Masa ke Masa, Cetakan Koran dahulu dan lainnya.

Selain itu, terdapat Ruang Mangku-

negaran, Ruang Peresmian Monpers, Ruang Sejarah Pers Surakarta dan Ruang Pamer Sejarah Pers.

Lanjut ke lantai dua, ada Ruang Rekam Sejarah Pers, Ruang Perpustakaan, Ruang Kemala serta Ruang Digitalisasi.

Seluruh perkembangan pers dipaparkan kepada rombongan. Mulai dari awal terbitkan koran cetak hingga e-paper yang muncul di era digitalisasi seperti saat ini.

Ketua PWI Surakarta, Anas Syahirul menuturkan, perjalanan Pers di Indonesia dimulai di Solo, yang dokumentasinya masih tersimpan rapi di Monumen Pers Nasional.

"Pergerakan sejarah perjalanan Pers Indonesia pada tahun 1946 lahir dari tempat ini," ungkapnya.

Anas menjelaskan, koleksi yang dimiliki Monumen Pers adalah bukti penting dari semua media yang didokumentasikan dengan rapi dan terawat di museum tersebut.

"Sampai saat ini sudah beberapa juta halaman koran yang sudah di digitalkan dari ribuan koleksi koran di Monumen Pers," ujarnya.

Dia mengatakan, untuk penerbitan



Penyerahan Plakat dari Kabag Prokopim Berau, Sunarto.

pers bisa mengirimkan bukti terbitnya ke Monumen Pers agar dapat didokumentasikan dan menambah koleksi museum.

Lanjutnya, awal mula pergerakan Pers di Indonesia ditandai dengan hadirnyawartawandariberbagaidieraerah ke Solo untuk mendeklarasikan Persatuan Wartawan Indonesia.

“Bangunan ini adalah saksi sejarah dan menjadi cagar budaya. Bangunan sejak awal dirancang modern fasilitasnya seperti ada helipadnya di rooftop atas. Dulu di atap atas juga menjadi tempat semedi Pak Harmoko (Menteri Penerangan era Presiden Soeharto),” jelasnya.

Sementara, Kepala Bagian Prokop-

im Berau, Sunarto menyampaikan terima kasih kepada jajaran PWI Surakarta dan pengurus Monumen Pers Nasional karena berkenan menerima kunjungan PWI Berau dengan Prokopim Berau.

“Ini adalah bentuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para Jurnalis Berau,” tuturnya.

Dirinya menerangkan, pers merupakan pilar ke-4 demokrasi yang kebebasannya dilindungi undang-undang. Sehingga sudah semestinya, insan pers menjadi media penyampaian setiap aspirasi masyarakat terhadap pemerintah, yang tentu saja diharapkan memahami tugas dan fungsinya dengan memperhatikan

kode etik jurnalistik yang berlaku.

“Sehingga berita yang disajikan harus mengedepankan fakta, bukan kebohongan atau hoaks,” tegasnya.

Sunarto berharap, insan pers agar taat terhadap etik jurnalistik, yang bukan semata mengejar atensi publik dengan sajian berita yang sekadar heboh atau click bait, terutama bagi media online yang menawarkan kecepatan.

“Saya ingin kemitraan Pemkab Berau dengan seluruh media dapat terus terjalin. Besar harapan saya rekan-rekan menjadi corong informasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat,” tandasnya. (dez)

Koran DIGITAL
MEDIA KALTIM.com
 Lebih Dekat dengan Satu Klik

<http://koran.mediakaltim.com/>

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0811 5405 033

media_kaltim
 mediakaltimdotcom
 mediakaltim.com
 media kaltim

Kadispopar Bontang Revisi Bonus Pelatih Porprov 2022

BONTANG – Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kota Bontang menjelaskan adanya kesalahan perhitungan terkait pencairan bonus pelatih cabor peraih medali di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Berau 2022 lalu.

Kepala Dispopar Bontang, Ahmad Aznem mengatakan, akan ada revisi besaran bonus yang akan diberikan. Dan perhitungan besaran bonus akan ditambah Rp 1,7 miliar. Sementara itu manager dan official nilai besaran uang tetap sama seperti yang ada dalam surat keputusan persetujuan pencairan.

"Anggaran ini tentu tidak bisa diberikan langsung karena dana tahun ini terbatas, jadi anggaran tambahan itu bakal diberikan pada tahun 2024.

Setelah direvisi, bonus ini akan dihitung berdasarkan persentase, dan hal ini pun sudah dibicarakan dengan DPRD Bontang.

Medali emas pertama akan mendapat bonus Rp 30 juta. Untuk yang cabor mendapat lebih dari satu emas, medali kedua akan dihitung 50 persennya atau Rp 15 juta. Untuk medali emas di atas 3 atau lebih akan terhitung nominal bonus sebesar 20 persen atau Rp 6 juta.

"Untuk medali perak, bonusnya sebesar Rp 25 juta. Perhitungannya juga sama. Dan untuk nominal medali perunggu pertama diberikan bonus senilai Rp 12 juta, perhitungannya akan begitu seterusnya," jelasnya.

Perhitungan ini dinilai ideal, dan menurut SK pelatih hanya ada 1. Dan jika pelatih lebih dari itu. Bonus perlu mereka bagi tentunya.

"Insya Allah malam ini atau besok para atlet sudah akan menerima bonus di rekening mereka," jelasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Nicha Ratnasari



SYAKURAH/RADARBONTANG)

Kepala Dispopar Bontang Ahmad Aznem

TOYOTA LET'S GO BEYOND

satu Indonesia

BOOKING THS SAJA

BTS

di Digiroom

DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNETIC SETIAP SERVICE BERKALA*

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

Kode Promo **BTSOLI**

*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi - Call/WA : **Adi S : 0822-5435-0088**

AUTO 2000 member of ASTRA

Bontang

Urusan Toyota lebih mudah!



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Suasana saat pembukaan Bioskop Cinema XXI di BCM.

Bioskop XXI Resmi Buka di Bontang, Jadi Alternatif Hiburan Masyarakat

BONTANG – Cinema XXI resmi beroperasi di Bontang City Mal (BCM) di Kota Bontang pada Rabu (11/10/2023) yang langsung dibuka oleh Wali Kota Bontang bersama jajaran Forkopimda.

Wali Kota Bontang, Basri Rase mengatakan Cinema XXI dapat menjadi sarana untuk hiburan bagi masyarakat Kota Bontang. Momentum pembukaan Cinema XXI juga menjadi momen dalam perayaan HUT ke-24 Kota Bontang.

“Cinema XXI menjadi sarana bagi warga dalam rekreasi bersama keluarga di Kota Bontang. Tentu Bontang akan selalu maju sejalan dengan tema HUT kali ini yakni Bergerak Lebih Maju untuk Menuju Bontang Lebih Hebat Beradab,” jelas Basri Rase, Rabu (11/10/2023).

Basri menambahkan Kota Bontang akan terus bergerak maju dengan melakukan investasi di berbagai bidang. Seperti investasi pembangunan perhotelan.

“Kota Bontang akan maju dan Bontang akan ramai. Kota Bontang juga menjadi kota centra dari berbagai daerah di Kaltim,” katanya.

Sementara, Head of Government Relations Cinema XXI, Suprayitno

mengatakan hadirnya Cinema XXI dapat menjadi tambahan sarana pariwisata pada industri pertunjukan film Bioskop. Ia mengatakan Cinema XXI di Bontang memiliki total 838 seat tempat duduk yang dapat dinikmati masyarakat.

“Cinema XXI sudah dibangun dengan desain interior mewah dengan suara teknologi terkini dan setara dengan bioskop kota-kota besar di Indonesia. Semoga dengan adanya XXI ini dapat berkontribusi positif di Kota Bontang dengan penyerapan

tenaga kerja dan pendapat asli daerah Bontang,” kata Suprayitno.

Ia mengatakan, Cinema XXI telah menerima penghargaan terkait bioskop yang telah setara yang ada di dunia. “Cinema XXI telah setara dengan bioskop luar negeri,” pungkasnya.

*Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari*



Polres Kutai Barat Mutasi Empat Kapolsek, Kapolres: Tambah Pengalaman dan Wawasan

KUTAI BARAT – Kepolisian Resor Polres Kabupaten Kutai Barat pada hari Senin (9/10/2023) lalu menggelar Upacara Serah Terima Jabatan empat Kapolsek. Acara yang dimulai pukul 08.30 Wita ini digelar di halaman Mako di Polres Kutai Barat, Jalan Gajah Mada, Kecamatan Barong Tongkok.

Kapolsek yang berganti yakni, Kapolsek Kecamatan Bentian Besar, Kapolsek Kecamatan Muara Lawa, Kapolsek Kecamatan Silug Ngurai dan Kapolsek Kecamatan Muara Pahu.

Sertijab ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Kapolda Kalimantan Timur tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.

Adapun pejabat yang diserahkan di antara yakni Kapolsek Bentian Besar dari AKP Edy Suharianto, kepada AKP Iriyanto. Kemudian Kapolsek Muara Lawa dari IPTU M. Safi'i, kepada pejabat baru IPDA Rinto Simanjuntak, Kapolsek Silug Ngurai dari IPTU Suyoto kepada pejabat baru IPTU M Safi'i dan Kapolsek Muara Pahu IPTU Aan Anwari kepada IPTU Suyoto.

IPTU Aan Anwari kini menjabat sebagai Kapolsek Long Hubung Polres Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Sedangkan AKP Edy Suharianto menjadi Kapolsek Sepaku Polres Penajam Paser Utara (PPU).

Dalam sambutannya, Kapolres Kutai Barat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Heri Rusyaman mengatakan, mutasi di lingkungan kesatuan/organisasi Polri juga merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi.

"Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pengalaman dan keluasan wawasan bagi pejabat yang bersangkutan, sebagai bekal pengembangan diri maupun jenjang karier berikutnya sesuai tujuan pembinaan personal," ujar Kapolres Kutai Barat AKBP Heri Rusyaman kepada MediaKaltim di Barong Tongkok, Rabu (11/10)

Heri Rusyaman menambahkan, mutasi ini juga bertujuan agar para Kapolsek yang baru mengikuti serti-

jab ,dapat menyesuaikan di tempat yang baru,begitu juga sebaliknya."

Dia juga mengajak kepada seluruh personel Polres baik Polri maupun PNS Polri agar senantiasa memberikan dukungan dan kerjasama kepada pejabat baru, sebagaimana yang telah ditunjukkan selama ini kepada pejabat lama.

"Mutasi ini diharapkan menjadi momentum untuk memacu dan meningkatkan semangat, disiplin dan ethos kerja dalam pelaksanaan tugas serta memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara secara profesional."ujarnya.

Untuk diketahui, yang bertindak selaku Inspektur Upacara yakni

Kapolres Kutai Barat AKBP Heri Rusyaman,bertindak sebagai Perwira upacara Kasat Resnarkoba AKP Wawan Gunaan dan Komandan Upacara IPDA Sugiarto.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni Waka Polres Kutai Barat Kompokol I Gde Dharma Suyasa, Kabag, Para Kasat, Para Kapolsek jajaran Polres Kutai Barat, dan Para perwira staf Polres Kutai Barat.

Pewarta : Ichal

Editor : Nicha Ratnasari



Sedang Pasang Rakang di Empang, Salman Diduga Diterkam Buaya

TENGGARONG - Nasib malang menimpa Salman (18), pemuda asal Kecamatan Sangasanga, diduga diterkam buaya saat sedang mencari kepiting di perairan kecil Kelurahan Sangasanga Dalam. Tepatnya di RT 11, pada Rabu (11/10/2023). Diperkirakan Salman diterkam sekitar pukul 12.00 Wita.

Kakak korban, Sumi, membenarkan kejadian naas tersebut. Saat kejadian, korban bersama adik iparnya, Angga, memang sedang melakukan aktivitasnya dengan memasang rakang. Saat itu, korban yang berada di atas perahu kecil turun ke dalam perairan untuk menaruh jebakan rakang. Namun tidak lama, tubuh Salman langsung ditarik ke dalam sungai oleh buaya.

"Kalau kakak iparnya (Angga) terlempar dari perahu kecil, saat buaya menarik tubuh Salman," ungkap Sumi saat dikonfirmasi via telepon, Rabu (11/10/2023).

Melihat Salman yang sudah menghilang karena diduga ditarik buaya, Angga pun bergegas kembali ke rumah dan memberitahukannya kepada orang tua korban. Lantas, keluarga korban pun langsung menuju lokasi kejadian diduga Salman diterkam buaya untuk melakukan proses pencarian. Dibantu oleh masyarakat sekitar dan Satpolairud Polres Kukar.

"Pencarian masih dilakukan sama warga sekitar, keluarga dan polisi. Memang pekerjaannya sehari-hari mencari kepiting," tutup Sumi.



Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari

A promotional advertisement for Toyota Motor Oil. The background is blue and purple. At the top left is the Toyota logo and the slogan "LET'S GO BERSAMA". At the top right is the "satu Indonesia" logo. The main text reads "SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN" and "TOYOTA MOTOR OIL". Below this, in large yellow letters, is "Khusus Taxi Online & Travel". On the left, there is an image of oil being poured into an engine. In the center, a yellow seal with a black border says "GUARANTEE PALING HEMAT GUARANTEE". On the right, there is a photo of a man in a white and red polo shirt and a red and white taxi. At the bottom left, it says "Informasi - Call/WA : Adi S : 0822-5435-0088". At the bottom right, there is the "AUTO 2000" logo with "member of ASTRA" below it. At the very bottom, it says "Bontang".

Kutim Masuki Usia ke-24, Bupati Ardiansyah Sampaikan Pidato di Rapat Paripurna ke-8

SANGATTA - Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menyampaikan pidato Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kutim seperti tahun-tahun sebelumnya di Rapat Paripurna ke-8, Ruang Sidang Utama Sekretariat DPRD Kutim, Rabu (11/10/2023) pagi.

Tampak memimpin Rapat Paripurna ke-8 dalam kegiatan mendengarkan pidato Bupati Kutim memperingati HUT ke-24 Kutim, antara lain Ketua DPRD Kutim Joni, Wakil Ketua I DPRD Asti Mazar, Wakil Ketua II DPRD Arfan dan beberapa anggota DPRD Kutim.

Hadir juga menyaksikan Wabup Kasmidi Bulang, Seskab Rizali Hadi, pejabat Eselon 2 dan 3, stakeholder, para tokoh-tokoh, perwakilan perangkat daerah (PD) dan undangan lainnya.

Saat membacakan pidato, Ardiansyah mengatakan pada HUT ke-24 Kutim mengambil Tema "Bersatu Untuk Maju Sejahtera Untuk Semua". Di kesempatan itu, ia mengajak semua pihak untuk bersyukur kepada Allah SWT. Karena pemimpin-pemimpin terdahulu telah meletakkan dasar yang kuat dan selalu menjadi inspirasi bagi semua untuk melanjutkan pembangunan, mengingat tantangan yang dihadapi akan semakin berat.

"Kita bersyukur kepada Allah SWT, dan memberikan penghargaan serta ucapan terima kasih terhadap jasa pengabdian dan dharma bhakti yang telah diberikan oleh pemimpin-pemimpin kita terdahulu yaitu Bapak Awang Faroek Ishak, Mahyudin, Isran Noor, dan Ismunandar. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah, rahmat dan karunia-nya atas jasa-jasa mereka Aamiin Ya Robbal Alaamiin," kata Ardiansyah.

Di sisi lain, saat ini ia mengimbau waspada terhadap fenomena pemanasan suhu muka laut (SML) yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah, atau dikenal dengan fenomena El-Nino yang memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum. Ia yakin, dengan karakteristik masyarakat Ku-

tim yang sangat pluralis dan berjiwa gotongroyong menunjukkan mampu bersatu untuk membangun Kutim yang lebih baik.

"Memasuki tahun 2023 atau tahun ke-3 masa pemerintahan kami, tema pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutim Tahun 2021-2026 adalah Pengembangan Sentra Ekonomi yang Didukung Pelayanan Publik yang Berkualitas," tegasnya.

RPJMD memberikan panduan dalam pengendalian pembangunan, sehingga seluruh sektor-sektor pembangunan dapat tumbuh secara harmonis, serasi, selaras dan seimbang serta berkeadilan. Pada RPJMD Kabupaten Kutim Tahun 2021-2026, kami berkomitmen untuk menjaga kesinambungan dan keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

"Pemkab Kutim telah menetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Kutim Tahun 2021-2026, yakni "Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua",

ucapnya.

Makna dari visi tersebut adalah terwujudnya kondisi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kutim yang baik, makmur, sehat dan damai melalui tata kelola pemerintahan yang baik, serta tercipta perubahan positif dan lebih produktif (continuous improvement) dalam mengelola sumber daya yang ada.

"Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah ialah mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu, mewujudkan daya saing ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian, mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara proporsional dan merata.

Selanjutnya, mewujudkan pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum dan teknologi informasi dan mewujudkan sinergitas pengembangan wilayah dan integrasi pembangunan yang berwawasan lingkungan," tutupnya.

Pewarta : Irfan Aditama
Editor : Nicha Ratnasari



Kompak Bisnis Sabu, Pasutri di Paser Masuk Bui

PASER- Pasangan suami istri (Pasutri) berinisial masing-masing MT (48) dan SK (41) warga Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, dibekuk jajaran Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba) Kepolisian Resort (Polres) Paser, Senin (9/10/2023).

Keduanya ditangkap setelah terbukti melakukan peredaran narkoba jenis sabu berdasarkan laporan masyarakat yang diselidiki Satresnarkoba Polres Paser dan Kepolisian Sektor (Polsek) Kuaro di sebuah rumah milik para pelaku.

Kasatresnarkoba Polres Paser, AKP Suradi menyatakan, penyelidikan ini terungkap setelah petugas menggerebek rumah pelaku. Hal ini dilakukan setelah diketahui bahwa kedua pelaku diduga sering melakukan transaksi sabu dirumahnya.

"Bersama anggota gabungan segera melakukan penggerebekan dan mengamankan pasutri tersebut untuk dilakukan interogasi dan pengeledahan badan serta ruangan tertutup lainnya di rumah tersebut," kata AKP Suradi, Rabu (11/10/2023).

Dari hasil pengeledahan, lanjut Suradi, petugas menemukan 8 paket sabu seberat 32 gram. Selain itu, 1 unit timbangan digital, 3 lembar tisu, 1 buah sendok takar, 1 buah dompet timbangan, 4 bundel plastik berbagai ukuran, 2 unit telepon genggam dan 2 unit CCTV.

"Kami temukan 2 unit CCTV itu lantaran digunakan para pelaku untuk memantau aktivitas diluar rumah melakukan transaksi sabu," jelasnya.

Daei sederet barang bukti itu, akhirnya petugas mengamankan keduanya ke Polres Paser untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan sementara dari para tersangka, mereka mengaku telah menjalani bisnis tersebut selama 1 tahun.

"Mereka sudah 1 tahun melakukan bisnis tersebut dan saat ini kami masih melakukan pendalaman untuk mengetahui dari mana para tersangka mendapatkan barang haram tersebut," ujarnya.

Akibatnya, kedua pelaku kini ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pasal 114 Ayat 2 juncto

pasal 132 Ayat 1 subsider pasal 112 Ayat 2 juncto pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman

maksimal 20 tahun penjara.

Pewarta : Bhakti Sihombing

Editor : Nicha Ratnasari



Para tersangka beserta barang bukti.



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Kegiatan pelatihan dilaksanakan di Gedung Serbaguna Petung, Rabu (11/10/2023).

Sebanyak 12 Desa di PPU Ikuti Pelatihan Perakitan Alat Pemanen Air Hujan

PPU-Sebanyak 12 kelurahan/desa di Penajam Paser Utara (PPU) menerima pelatihan sebuah inovasi. Yakni pelatihan perakitan alat panen hujan.

Pj Bupati PPU Makmur Marbun membuka secara resmi sosialisasi dan pelatihan perakitan alat pemanen air hujan, Rabu (11/10/2023). Kegiatan ini dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU dalam rangka peningkatan kapasitas Program Kampung Iklim (Proklim) 2023.

Digelar di Gedung Serbaguna kelurahan Petung, Makmur memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pelatihan tersebut. Dirinya berharap setelah melalui pelatihan ini 12 desa dan kelurahan ini mampu menjadi percontohan perakitan alat pemanen air hujan bagi desa lainnya di PPU.

"Sosialisasi dan pelatihan ini penting dilaksanakan agar perangkat

desa maupun kelurahan yang mengikuti kegiatan ini lebih memahami. Saya berharap 12 desa ini bisa menjadi percontohan bagi desa lainnya di kabupaten PPU," katanya.

Sementara itu Kepala DLH PPU, Tita Deritayati menjelaskan proklim merupakan sebuah gerakan nasional di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Proklim juga merupakan kegiatan pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas, merupakan respon terhadap dampak perubahan iklim yang telah terjadi.

Meliputi kegiatan adaptasi dan mitigasi yang melibatkan masyarakat di tingkat tapak. "Kegiatan adaptasi dan mitigasi Proklim merupakan kegiatan di masyarakat dilakukan sehari-hari, dilengkapi dengan kelembagaan yang ada," ujar dia.

Semisal pemilahan sampah, com-

posting, pemanfaatan lahan perkarangan, perlindungan sumur dan mata air. Kemudian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penggunaan energi baru terbarukan, penggunaan pupuk organik.

Kegiatan kali ini merupakan salah satu dari adaptasi proklim dengan tujuan agar masyarakat di 12 kelurahan/desa dapat mengetahui cara pemanfaatan air hujan. Dengan melalui teknologi filterisasi, hingga menjadi air bersih yang layak untuk diminum langsung.

"Secara umum Kami berharap kegiatan Proklim dapat meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan meningkatkan kualitas hidup sosial ekonomi masyarakat," tutup Tita. (SBK)



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Kepala Dinas PUPR PPU, Riviana Noor.

Progres Lamban, Satu Kontraktor Jalan Diputus Kontrak

PPU - Satu proyek pekerjaan jalan di Kecamatan Babulu, Penajam Paser Utara (PPU) disetop. Alasannya karena progres pengerjaan pembangunan yang dinilai lamban.

Dinas Pekerjaan Umum dan Peningkatan Ruang (PUPR) PPU tengah melakukan satu pemutusan hubungan kerja dengan salah satu kontraktor. Dalam proyek untuk pengerjaan proyek jalan di Babulu.

Kepala Dinas PUPR PPU, Riviana Noor menjelaskan pemutusan hubungan kerja itu pada bulan Oktober ini. Kini sedang proses administrasi untuk pemutusan tersebut.

"Kita sekarang masih dalam proses klaim. Nanti kalau sudah klaim

selesai kita akan lapor ke BPK baru bisa di ekspos ya," kata dia, Rabu (11/10/2023).

Setelah selesai administrasi, hasilnya akan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Riviana menegaskan, penyebabnya ialah progres pengerjaan yang lambat. Pada pengerjaan peningkatan jalan itu sekira 1.6 kilometer, hingga September baru mencapai 10 persen.

Sedangkan untuk anggaran yang direncanakan hanya sekitar Rp 6 miliar. "Cuma produknya rigid, anggaran cuma 6 miliar cuman karena rekanannya tidak siap, jadi sampai dengan akhir kontrak progresnya

sangat kecil. Setelah kita evaluasi ya tidak memungkinkan untuk dilanjutkan," jelasnya.

Lebih lanjut, setelah dilakukan evaluasi oleh Dinas PUPR, permasalahan terjadi secara internal perusahaan proyek tersebut. Namun perusahaan tersebut sempat membantah karena kesulitan material.

"Setelah Kami evaluasi, tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Masalahnya non teknis. Kalau kita evaluasi, alasannya non teknis kalau alasan kontraktor ya, masalah kelangkaan material dan sebagainya. Kalau evaluasi kami ya dari management," tutup Riviana. (SBK)



LOWONGAN JURNALIS

Media online **MEDIA KALTIM GROUP** membutuhkan beberapa tenaga profesional untuk bergabung di tim redaksi **SAMARINDA & PENAJAM PASER UTARA (PPU)** :

JURNALIS

SYARAT:

Maksimal usia 25 tahun, berjiwa tim, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kreatif, dan menyukai tantangan. Fresh graduate boleh melamar, diutamakan kandidat berpengalaman bidang jurnalisme atau media

Deadline Pengirim CV & Lamaran 30 September 2023.

Pastikan mencantumkan posisi yang dilamar pada subjek email atau pesan WA.

Kirimkan ke **redaksi@mediakaltim.com**

atau WA ke **0853-4894-3982 (SAMARINDA)**
0815-4910-5488 (PPU)

radar.
MEDIA

MEDIA KALTIM GROUP





DINKES KALTIM
SUSUN RENSTRA 2024-2026



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Dra. Sri Wahyuni M,PP
SEKDA PROV. KALTIM



Dr. Akmal Malik, M.Si
PG GUBERNUR KALTIM



dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Dr Jaya Muallimin. (Istimewa)

DINKES KALTIM FOKUS PENURUNAN KASUS DBD

SAMARINDA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah optimis untuk menurunkan angka kasus dan kematian akibat demam berdarah dengue (DBD) di Kaltim.

"Angka DBD di Kaltim masih tinggi, dengan incident rate (angka kejadian) DBD di Kaltim adalah 85,2 per 100.000 penduduk dan case fatality rate (angka kematian) adalah 0,48 persen. Kami juga berhasil menurunkan angka kematian menjadi 50 persen sampai September kemarin," ungkap Kepala Dinkes Kaltim, Kamis (5/10/2023).

Ia menjelaskan ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan warga untuk menekan angka DBD, salah satunya adalah dengan memiliki kebijakan terkait eliminasi atau percepatan

penurunan angka DBD.

"Alhamdulillah semua daerah di Kaltim sudah memiliki kebijakan tentang hal ini. Kegiatan dengan regulasi meliputi pengendalian vektor, penataan lingkungan, dan manajemen kasus seandainya ada anak yang terinfeksi," ujarnya.

Jaya juga menambahkan, penataan lingkungan dilakukan dengan menerapkan 3M, yakni mengurangi, menutup, dan mengubur tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Kemudian gotong royong warga untuk membersihkan selokan, lingkungan, dan sampah agar tidak menjadi habitat nyamuk.

Adapun upaya fogging untuk membunuh nyamuk dewasa dan menggunakan abate sebagai pengendali jentik nyamuk. Akan tetapi, fogging tidak disarankan

karena bisa berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

"Sebaiknya menjaga pola lingkungan bersih dan sehat adalah pencegahan DBD terbaik," bebernya.

Adanya program jangka panjang, lanjut Jaya, melibatkan nyamuk yang sudah diberi bakteri Wolbachia yang dapat mengendalikan virus dengue. Program ini sudah dilakukan di lima kota di Indonesia termasuk Bontang.

"Kami kemarin kaji di Semarang sebagai pilot project Indonesia. Ada program untuk salah satu pengendalian vektor nyamuk yang diluncurkan bulan kemarin. Kami harap program ini berhasil dan bisa disebar ke daerah lain," pungkasnya. **(Nta/adv/Dinkes)**

Pewarta : Nita

Editor : Nicha Ratnasari



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Dra. Sri Wahyuni MPP
SEKDA PROV. KALTIM



Dr. Akmal Malik, M.Si
P2 GUBERNUR KALTIM



dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Dr Jaya Mualimin. (Istimewa)

IMPLEMENTASI PERGUB NOMOR 22 DIPERTAJAM

SAMARINDA - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Jaya Mualimin menyatakan bawah pihaknya tengah mempertajam pengimplementasian Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2023 terkait penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan.

"Pergub ini telah lama ditunggu dan dirancang terkait pengelolaan pemerintahan di bidang kesehatan. Adanya tata kelola kelembagaan rumah sakit umum daerah (RSUD) di beberapa pasal menjadi lingkup Dinkes," jelas Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin, Jumat (6/10/2023). Menurut Jaya, Pergub itu bertujuan untuk menyamakan persepsi dan indikator kinerja antara Dinkes dan seluruh rumah sakit yang ada di Kaltim.

Kegiatan yang berhubungan dengan layanan harus dilaporkan atau disinkronkan dengan indikator yang sudah dibuat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu merupakan kunci Dinkes harus sama dengan apa yang dilakukan seluruh rumah sakit sehingga tidak ada yang berbeda.

Jaya menyebut Dinkes adalah dinas yang

menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan. Disini ada badan pengawas rumah sakit yang nantinya akan difungsikan apabila banyak keluhan dari masyarakat.

"Masyarakat boleh menyampaikan keluhannya. Kemudian kalau di puskesmas punya keluhan bisa ke dewan pertimbangan klinik. Silakan buat pengaduan semacam meminta menjembatani kalau tidak puas. Jika mau yang lebih besar ada Ombudsman, langsung ke sini kalau ada laporan," imbuhnya.

Ditambahkan Jaya, di Pasal 17 Pergub Nomor 22 tahun 2023 disebutkan bahwa rumah sakit dipimpin oleh direktur dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

"Hal itu sebetulnya sangat relevan sekarang tren publik harus meningkatkan mutu layanan agar masyarakat luas luas. Karena dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan pengelolaan keuangan itu sangat membantu dalam pengelolaan masyarakat itu sendiri. Semua rumah sakit menggunakan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)," tutup Jaya. **(nta/adv/Dinkes).**

Pewartanya : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Dra. Sri Wahyuni M,PP
SEKDA PROV. KALTIM



Dr. Akmal Malik, M.Si
PG GUBERNUR KALTIM



dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Muallimin. (Istimewa)

AWAS, KENCING TIKUS AKIBATKAN PENYAKIT LEPTOSPIROSIS

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengimbau kepada warga untuk mewaspadai penyakit leptospirosis yang disebabkan oleh kuman leptospira interrogans dari kencing tikus. Dan saat ini pihak Dinkes tengah menangani kasus tersebut.

"Hingga saat ini hanya ada satu orang yang dilaporkan mengidap leptospirosis dari Kutai Barat dan sudah sembuh. Sementara itu, tidak ada pasien yang dirawat akibat leptospirosis di Bontang, namun di sana ditemukan tikus yang positif bisa menularkan leptospirosis," jelas Kepala Dinkes Kaltim Jaya Muallimin, Kamis (5/10/2023).

Dijelaskannya, leptospirosis bisa menular melalui kontak dengan air atau tanah yang tercemar kencing tikus. Adapun gejalanya yakni demam,

sakit kepala, nyeri otot, kuning, dan gangguan ginjal.

Jaya menyebutkan, Dinkes Kaltim telah melakukan pemeriksaan hewan dari beberapa sampel di daerah Kutai Barat dan Bontang. Tetapi belum ditemukan tikus yang positif dengan orang yang terkena penyakit pada dua daerah itu.

"Kami masih menyelidiki apakah ada orang yang terkena saat mandi atau mengonsumsi air yang tercemar kencing tikus. Kami juga masih menunggu hasil pemeriksaan tikus di Kabupaten Mahakam Ulu, karena ada laporan ada pasien leptospirosis dari sana," ungkapnya.

Lebih lanjut, dengan ini mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan air atau tanah yang tercemar kencing tikus. Jaya juga men-

yarankan untuk merebus air dahulu sebelum diminum atau digunakan untuk mandi.

"Kami juga akan berkerja sama dengan dinas terkait untuk memberantas tikus yang terutama berada di perkampungan. Kami sudah berkordinasi ke Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup untuk membantu menangkap dan memeriksa tikus," ujarnya.

Kemudian, jika ada masyarakat yang mengalami gejala yang mengarah ke leptospirosis, segera periksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.

"Kasus ini jangan dianggap sepele, karena bisa berakibat fatal jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat," tutup Jaya. **(Nta/adv/Dinkes)**

Pewarta : Nita

Editor : Nicha Ratnasari



Renstra bertujuan untuk menjawab isu terkait kesehatan. (Istimewa)

Dinkes Kaltim Susun Renstra 2024-2026

SAMARINDA - Dokumen Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah tahun 2024-2026, telah disusun oleh Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, dengan memperhatikan isu-isu strategis kesehatan dan perencanaan untuk pengarusutamaan gender.

"Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam kegiatan itu adalah terkait dokumen perencanaan untuk pengarusutamaan gender yang harus dimasukkan dalam domain perencanaan Dinkes Kaltim tahun 2024," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Dr Jaya Mualimin, Kamis (5/10/2023).

Disebutkannya, beberapa dokumen Dinkes Kaltim memang ada beberapa yang masuk indikator nasional termasuk pengarusutamaan gender yang harus dilaksanakan sesuai undang-undang.

"Untuk pengarusutamaan gender, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus melaksanakan rencana ini termasuk Dinkes Kaltim, karena dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan masuk dalam Rencana Pembangunan Umum Daerah (RPUMD), dan menjadi program setiap tahunnya," ujarnya.

Selain itu, Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinkes Kaltim Agus Budiarto menjelaskan tujuan penyusunan Renstra ini selain untuk mengkoordinasikan rencana pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis di bidang kesehatan, juga menyusun Renstra Dinkes Kaltim yang terintegrasi dan responsif.

Beberapa isi strategis kesehatan, diantaranya penurunan angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, perbaikan pengelolaan

jaminan kesehatan, penguatan pelayanan kesehatan serta isu terkait obat dan alat kesehatan. Hal itu untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah.

"Dalam menyusun Renstra, kita tidak hanya melakukan evaluasi program dan kegiatan yang sudah berjalan selama tahun 2019-2022, tetapi juga menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan mempertajam indikator dan target kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah pada tahun yang akan datang," beber Agus.

Dalam penyusunan Renstra, melibatkan 24 peserta dari Dinkes Kaltim dan 12 peserta dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Dinkes Kaltim. **(Nta/adv/Dinkes)**

Pewarta : Nita

Editor : Nicha Ratnasari



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIM



Dr. Akmal Malik, M.Si
PJ GUBERNUR KALTIM



dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Pelatihan
PKMN tingkat-
kan kualitas
pelayanan ibu
dan bayi baru
lahir. (istimewa)

TURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU & BAYI DENGAN PELATIHAN PKMN BAGI NAKES

SAMARINDA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar pelatihan penanganan kegawatdaruratan bagi dokter umum, bidan dan perawat di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) primer bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Berau sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

"AKI dan AKB di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Berdasarkan hasil survei penduduk antara sensus (SUPASI) 2015, AKI di Indonesia adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan AKB adalah 24 per 1.000 kelahiran hidup," jelas Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Muallimin, Jumat (6/10/2023).

Menurut Jaya, salah satu faktor penyebab kematian ibu dan bayi adalah komplikasi yang terjadi pada saat masa kehamilan, persalinan dan nifas.

Komplikasi tersebut dapat dicegah dan di-

tangani bila tenaga kesehatan mampu melakukan identifikasi dini, memberikan pertolongan pertama, melakukan tindakan stabilitas pasien, dan merujuk ke rumah sakit bila perlu.

"Untuk itu, kami mengadakan pelatihan PKMN yang komprehensif dan tepat sasaran bagi tenaga kesehatan di Fasyankes primer dari Kabupaten Berau," ujarnya.

Ditambahkan Jaya, pelatihan ini meliputi teori dan praktik tentang penggunaan partograf, manajemen aktif kala II, resusitasi neonatus, pencegahan infeksi, dan rujukan efektif.

Ia berharap pelatihan PKMN tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Berau.

"Kami mengapresiasi kerjasama antara Dinas Kesehatan Kaltim dengan Balai Pengembangan Pendidikan Kesehatan (Bapelkes) Samarinda dalam penyelenggaraan pelatihan ini," pungkasnya. **(nit/adv/dinkes)**

Pewartu : Ernit

Editor : Nicha Ratnasari



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Dra. Sri Wahyuni MPP
SEKDA PROV. KALTIM

Dr. Akmal Malik, M.Si
PD GUBERNUR KALTIM

dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Dr Jaya Muallimin. (Istimewa)

CEGAH STUNTING, BERIKAN BAYI ASI EKSKLUSIF

SAMARINDA- Pemberian ASI (air susu ibu) eksklusif selama enam bulan pertama merupakan salah satu upaya dalam pencegahan bayi stunting. Hal ini dikatakan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Muallimin.

"ASI eksklusif artinya bayi hanya mendapatkan ASI tanpa tambahan susu atau makanan lain, termasuk susu kental manis yang tidak baik untuk kesehatan bayi," ungkap Kepala Dinkes Kaltim Jaya Muallimin, Senin (9/10/2023).

Ia juga menjelaskan, ASI sudah mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

"ASI mengandung protein, lemak, karbo-

hidrat, vitamin, mineral, dan zat untuk kekebalan tubuh yang dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit," ujarnya.

Sehingga, Jaya mengajak para ibu hamil dan menyusui untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

Selain itu, juga mengimbau para calon pengantin untuk mengikuti sekolah calon ibu. Karena para calon ibu akan mendapatkan ilmu tentang cara menyusui yang benar, manfaat ASI, dan cara mengatasi masalah dalam menyusui.

"ASI eksklusif adalah investasi masa depan bagi anak kita," tutup Jaya. **(nta/adv, Dinkes)**

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIM



Dr. Akmal Malik, M.Si
PJ GUBERNUR KALTIM



dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



kucing peliharaan juga wajib melakukan vaksin untuk cegah penyakit zoonosis. (Istimewa)

WASPADA PENYAKIT ZONOSIS, SEGERA VAKSIN HEWAN PELIHARAAN

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersinergi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim melakukan vaksinasi rutin agar masyarakat terbebas dari penyakit zoonosis.

"Kami mengingatkan masyarakat agar mewaspadaai penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya," kata Kepala Dinkes Kaltim Jaya Muallimin, Senin (9/10/2023).

Jaya mengatakan, zoonosis disebabkan oleh mikroorganisme parasit yang dapat berupa bakteri, virus, jamur, serta parasit seperti protozoa dan cacing.

Sedangkan untuk penularan zoonosis, dapat menular melalui tiga cara yaitu langsung, tidak langsung, dan konsumsi.

"Beberapa penyakit zoonosis itu, yakni rabies, antraks, dan leptospirosis," ujarnya.

Dinkes Kaltim tengah mengencakan vaksinasi terhadap anjing liar dan hewan peliharaan lainnya, guna menjadikan wilayah tersebut bebas dari penyakit rabies.

"Kami pastikan anjing liar divaksin karena mereka berpotensi menularkan rabies kepada manusia," kata Jaya.

Kendati demikian, hewan peliharaan lainnya pun wajib divaksinasi termasuk kucing. Karena kucing jika terkena rabies juga bisa menyebabkan gejala yang sama dengan anjing. Dan hewan lainnya juga perlu mendapatkan vaksin adalah kera.

Jaya mengimbau kepada masyarakat untuk segera membersihkan luka gigitan hewan dengan

air mengalir dan sabun.

"Jangan sampai virus rabies masuk ke dalam tubuh. Segera periksakan diri ke Puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan suntikan anti rabies," ucapnya.

Jaya meminta masyarakat yang memiliki hewan peliharaan sebagai binatang kesayangan dan merawatnya dengan baik. Vaksin untuk hewan peliharaan disediakan secara gratis seperti yang dilakukan untuk sapi dan kerbau.

"Di Kaltim, ada penyakit zoonosis lain yang berasal dari sapi dan kerbau, yaitu anthrax. Kita sudah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan untuk penyakit zoonosis," pungkasnya.

(Nta/adv/Dinkes)

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Dra. Sri Wahyuni MPP
SEKDA PROV. KALTIM

Dr. Akmal Malik, M.Si
PD GUBERNUR KALTIM

dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



TINGKATKAN SINERGITAS PROVINSI & KABUPATEN/KOTA LEWAT REMBUK STUNTING,



Kepala Dinas
Kesehatan
Kaltim Dr Jaya
Muallimin. (Me-
dia Kaltim)

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rembuk stunting tingkat provinsi tahun 2023 untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menurunkan angka stunting di wilayah setempat.

"Kami melakukan koordinasi dengan seluruh dinas terkait untuk percepatan penurunan stunting sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021," kata Jaya, di Hotel Mercure, Senin (9/10/2023).

Jaya mengatakan, dinas terkait dalam penanganan stunting yakni Dinas kesehatan Kaltim, Dinas pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan Dinas Tanaman Pangan.

Ia menjelaskan, dalam rembuk stunting itu bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya menurunkan angka stunting di Kaltim. Dinas kesehatan Kaltim berlaku sebagai koordinator untuk Tim Pengendali Penyakit dan Penye-

hatan Lingkungan (TPPS) yang berkoordinasi dengan kepala daerah dari sepuluh kabupaten dan kota se-Kaltim.

Salah satu intervensinya adalah sensitif terhadap lingkungan, rumah sehat layak huni yang disana ada sanitasi yang baik, ketersediaan air yang menjadi urusan dari Dinas PUPR.

Kemudian, terkait keluarga yang harus dibantu melalui program keluarga harapan harus punya kartu BPJS yang menjadi urusan Dinas Sosial. Untuk pemberian makan bergizi, diupayakan melalui Dinas Pertanian dan Dinas Tanaman Pangan dan Dinas Kelautan.

"Selain itu ditekankan juga pentingnya kesadaran ibu menggunakan ASI eksklusif dan melaksanakan pola asuh yang baik bagi anaknya," ungkap Jaya.

Jaya pun mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak (DKP3A) bersama BKKBN, dengan program Sekolah Calon Pengantin, Sekolah Ibu Hamil, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

"Semua dinas terkait dirangkul dalam koordinasi Dinas Kesehatan Kaltim dalam konvergensi penanganan program," ujarnya.

Kemudian, program intervensi spesifik yang dilakukan Dinas Kesehatan Kaltim, antara lain pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pemeriksaan kehamilan minimal empat kali bagi ibu hamil, pemberian vitamin A bagi anak-anak, dan pemberian makanan tambahan bagi anak yang mengalami kekurangan energi kalori atau MPASI.

"Ketika ibu melahirkan harus memberikan ASI selama 24 bulan kemudian imunisasi dasar lengkap bagi anak," imbuhnya.

Menurut Jaya, beberapa program intervensi spesifik lainnya terkait anak yakni melakukan timbang berat badan dan diukur tinggi badan serta dipantau setiap bulan dan dilaporkan di TPPS.

"Tadi sudah dilibatkan data yang terintegrasi bisa kita lihat sebulan sekali melalui data geospasial, kita bisa melihat bayi lokasinya dimana dan posyandunya apa," pungkasnya. **(Nta/adv/Dinkes)**

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari

MEDIA KALTIMTARA

KAMIS,
12 OKTOBER
2023

.COM

PASANG IKLAN
HUBUNGI:
0853 8684 3137

TERDEPAN DALAM BERITA



**HARGA BERAS
DI TARAKAN
RP 17.000 PER KG**

BACA HALAMAN 2



**TERGIUR UANG RP30
JUTA, SEORANG IBU
NEKAT JADI KURIR SABU**

BACA HALAMAN 9



Harga Beras di Tarakan Tembus Rp 17.000 per Kilogram

TARAKAN - Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, terus merangkak naik dan saat ini telah mencapai Rp 17.000 per kilogram untuk beras kualitas premium. Kenaikan harga beras ini dikeluhkan banyak masyarakat, namun belum menyebabkan penurunan daya beli masyarakat.

Menurut pedagang beras di Pasar Gusher Tarakan, seluruh kualitas beras, termasuk beras kualitas medium dan rendah, mengalami kenaikan harga. Salah satu pedagang beras, Wahyu (27), mengatakan harga beras di Pasar Gusher tembus Rp 17 ribu per kilogram untuk kategori premium.

"Stabil di harga Rp 17.000. Dari harga Rp 13.000 sebulan yang lalu, kemudian naik menjadi Rp 15.000

dan kini sudah mencapai Rp 17.000. Itu beras merek Lahap dan Lele," ungkapnya saat ditemui di Pasar Gusher, Rabu (11/10/2023).

Selain premium, beras kategori medium juga mengalami kenaikan. Dari yang sebelumnya Rp 12.000, kini naik menjadi Rp 15.000 hingga Rp 16.000. "Beras medium itu jenis beras Nusantara," lanjutnya.

Wahyu mengatakan untuk beras premium dan medium stoknya relatif aman, karena pengiriman dari luar daerah seperti Sulawesi masih lancar. Hanya saja, katanya, stok yang habis hanya beras Bulog. Namun dia tak menjelaskan secara jauh penyebab beras Bulog kosong. "Ada sih barangnya di sana, tapi belum dikeluarkan dari gudang. Gak tahu kapan keluar

karena kalau saya telpon kesana susah diangkat," katanya.

Imbas dari kenaikan harga beras ini, lanjut Wahyu, banyak masyarakat yang mengeluhkan hal tersebut. Namun dia menyebut belum ada penurunan daya beli masyarakat. "Otomatis ada keluhan karena harga beras tinggi, namun daya beli masyarakat masih stabil aja," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, saat dilakukan pemantauan harga beras di Pasar Gusher pada Selasa (26/9/2023) lalu. Menurut Sandi (29), pedagang Pasar Gusher, harga beras untuk kategori premium seperti Lahap dan Lele, berada di kisaran Rp 14.000-15.000 per kilogram. Sementara untuk beras medium berada di kisaran harga Rp 12.000. (APC)



Kapal Wisata Milik Pemkab Bulungan, Diharapkan Dapat Memberikan Multiplayer Efek Bagi Daerah.

Bupati Bulungan Minta Dinas Pariwisata Segera Lakukan Manajemen Kapal Wisata

TANJUNG SELOR - Bupati Bulungan, Syarwani, meminta kepada Dinas Pariwisata untuk segera mengelola pengolahan kapal wisata dengan baik agar dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan sektor pariwisata di Bulungan.

"Saya meminta kepada Dinas Pariwisata untuk mengelola Kapal Tenguyun Sungai Kayan dengan baik agar dapat memberikan manfaat bagi pengembangan sektor pariwisata di Bulungan," ungkap Syarwani pada Rabu (11/10/2023).

Kapal wisata ini telah diikutsertakan dalam acara Biduk Bebandung yang memperingati Hari Lahir Kabupaten Bulungan dan Kota Tanjung Selor. Dengan tindakan ini, Syarwani

ingin secara tidak langsung meluncurkan dan memperkenalkan kepada publik bahwa pemerintah Bulungan sekarang memiliki kapal wisata.

"Kami berharap ini dapat menjadi ikon wisata baru di Bulungan, selain dari acara tahunan Sungai Kayan yang diadakan setiap tahun," katanya.

Rencananya, kapal wisata ini akan mengelilingi Sungai Kayan dan sekitar Kabupaten Bulungan, tetapi harus dikelola dan dikelola dengan baik.

"Saya telah memberikan tugas kepada Dinas terkait untuk segera menyusun manajemennya sehingga nantinya, pada saat ada acara di Sungai Kayan, kapal wisata ini dapat digunakan," jelasnya.

Pemerintah belum menetapkan

tarif untuk pengunjung kapal wisata, tetapi akan ada retribusi yang akan ditetapkan. Ini karena fasilitas ini memerlukan pemeliharaan dan pengelolaan oleh tenaga profesional.

Diharapkan Kapal Wisata Tenguyun Sungai Kayan dapat memberikan efek positif, yaitu pengunjung dari luar Bulungan dapat menikmati pengalaman baru di Sungai Kayan. Prinsipnya, ketika wisatawan datang ke Kabupaten Bulungan, akan ada dampak positif, seperti peningkatan okupansi hotel dan pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku UMKM," tutupnya. (tin)



Kapal Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Bulungan, Siap Dioperasikan.

Pemkab Bulungan Hadirkan Kapal Wisata untuk Dongkrak Pendapatan Daerah

TANJUNG SELOR - Pemerintah Kabupaten Bulungan, melalui Dinas Pariwisata, terus berupaya untuk memperkenalkan potensi sektor wisata di Bulungan.

Salah satunya adalah dengan pengadaan kapal wisata yang diberi nama Kapal Tenguyun Sungai Kayan. Pemerintah optimis bahwa adanya kapal wisata ini dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.

Kepala Dinas Pariwisata Bulungan, Septi Ding, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa efektivitas kapal tersebut dalam mendukung pengenalan budaya Bulungan sebenarnya belum dapat diukur, karena masih ada beberapa hal yang harus dibenahi.

Namun, ada beberapa langkah yang seharusnya dilakukan untuk menarik wisatawan ke Bulungan. Selain melalui kapal wisata, promo-

si melalui media sosial dan upaya branding menjadi salah satu caranya.

"Bagaimanapun jenisnya, jika kita bisa melakukan branding dengan baik, maka hal itu akan mendatangkan para wisatawan," ujarnya.

Sementara itu, terkait pengelolaan kapal wisata, teknis operasionalnya masih dalam tahap perencanaan. Selain berkeliling, kapal wisata ini juga akan dijadikan sebagai kafe terapung.

Menurut Dinas Pariwisata Bulungan, kehadiran kapal wisata ini dapat menarik para wisatawan dan juga mendukung pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bulungan.

"Kami telah berdiskusi dengan pihak ketiga, dan banyak yang berminat. Pengelolaan kapal wisata ini juga dapat dijadikan sebagai kafe terapung," ungkapnya.

Namun, karena operasional berkeliling cenderung mahal, akan ada skema khusus untuk menentukan kapan kapal akan berkeliling dan ka-

pan akan berada di tempat tertentu.

Hingga saat ini, banyak yang bertanya tentang biaya charter kapal tersebut. "Kami belum menghitung paket tersebut karena harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu, termasuk nilai kapal dan biaya operasionalnya," jelasnya.

Selain itu, tarif dan menu dalam kapal wisata tersebut juga belum ditentukan. Menu yang akan ditawarkan dalam kapal ini biasanya berupa makanan ringan, sehingga konsepnya bersifat mobile.

Pembuatan kapal wisata ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan total senilai Rp 700 juta. Kapal pesiar ini memiliki spesifikasi mesin sekitar enam pilet, panjang badan kapal 21 meter, dan lebar 4 meter. "Kapasitasnya bisa menampung 50-70 orang," tambahnya. (tin)



Rombongan Pemerintah Daerah Saat Menaiki Biduk Bebandung, Serta Pengenalan Budaya Bagi Generasi Muda Penerus Masa Depan.

Biduk Bebandung Kembali Digelar di Harlah Kabupaten Bulungan

TANJUNG SELOR - Masih dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) Kabupaten Bulungan dan Kota Tanjung Selor, pemerintah daerah dengan OPD terkait kompak mengenakan pakaian adat khas Bulungan.

Selain itu, rombongan menyeberang dari Tanjung Selor ke Tanjung Palas naik perahu kembar atau dikenal dengan sebutan Biduk Bebandung.

Biduk Bebandung merupakan tradisi Kesultanan Bulungan dalam menyambut tamu kehormatan. Saat penyeberangan Sungai Kayan, dibekalkan tentang arti dan sejarah Biduk Bebandung serta sajian makanan juga tari selamat datang bagi tamu.

Setibanya di Tanjung Palas, rombongan menuju Masjid Kasimuddin untuk menggelar doa Tahlil bagi para pemimpin dan Sultan Bulungan terdahulu. Dilanjutkan, ziarah ke makam Kesultanan Bulungan serta

ramah tamah di Gedung Kesenian Tanjung Palas.

Bupati Bulungan, Syarwani mengucapkan salam hormat kepada seluruh keluarga Kesultanan Bulungan, serta pemimpin terdahulu. Juga disampaikan penghargaan yang tinggi kepada ketua lembaga adat di Bulungan, pimpinan paguyuban, organisasi permasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi wanita serta komunitas pemuda yang turut menampilkan seni tradisional di Gedung Kesenian Tanjung Palas.

“Kita berkumpul di Gedung Kesenian Tanjung Palas ini, untuk bersilaturahmi dan ramah tamah sekaligus melestarikan budaya sejak zaman Kesultanan Bulungan,” ungkap Syarwani.

Dikatakan, tradisi tersebut kembali dilaksanakan dalam rangkaian peringatan hari jadi Kota Tanjung Selor ke-233 dan Kabupaten Bulungan ke-

63 tahun 2023.

“Cara ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menjaga serta melestarikan warisan tradisi budaya. Sebagai bentuk penghormatan kepada para pemimpin Bulungan terdahulu,” ungkapnya.

Selain itu, juga dijadikan sebagai bentuk pengenalan tradisi kepada generasi muda sebagai penerus di masa mendatang.

Selain itu, Syarwani memohon doa dan dukungan masyarakat, supaya seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan lancar. Ditegaskan, Syarwani bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, tanpa adanya daya dukungan masyarakat.

“Kolaborasi serta sinergi dengan semua unsur, diperlukan demi kemajuan pembangunan daerah, ke arah yang bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” tutupnya. (tin)



Polda Kaltara Gelar Rapat Koordinasi untuk Persiapan Operasi Mantap Brata, Menyongsong Pemilihan Umum 2024

Amankan Pemilu 2024, Polri Bakal Gelar Operasi Mantap Brata

TANJUNG SELOR – Menyongsong pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) secara serentak tahun 2024, Polda Kaltara menggelar rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri oleh unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kaltara.

Wakapolda Kaltara, Brigjen Pol Kasmudi, memimpin langsung rakor tersebut, dalam penyampaian yang merupakan arahan dari Kapolda Kaltara, bahwa menyambut pesta demokrasi, kepolisian akan melancarkan operasi Mantap Brata Kayan 2023-2024.

“Sebentar lagi kita akan melaksanakan pelaksanaan tahun politik berupa pemilu dan Pilkada yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, oleh karena itu, untuk menjamin sisi keamanan, perlu dilaksanakan operasi Mantap Brata Kayan 2023-2024,” ujar Wakapolda.

Terkait Pemilu serentak 2024, Presiden RI Joko Widodo, telah menekankan pentingnya momen politik ini sebagai pesta demokrasi terbesar, serta diselenggarakan secara serentak.

Kepala Negara menyadari bahwa pemilu merupakan pekerjaan besar yang akan sangat mempengaruhi masa depan Bangsa dan Negara Indonesia. “Pemilu 2024 dianggap sebagai titik persimpangan sejarah Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” jelas Wakapolda.

Dikatakan, Polri sebagai pemelihara kamtibmas dan penegak hukum membutuhkan dukungan semua pihak untuk menciptakan rasa aman, mengatasi potensi kerawanan, dan memastikan pemilu berkualitas.

Sehingga perlu dilakukan koordinasi sejak awal, termasuk menjalin kerjasama erat dengan seluruh instansi pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu.

“Cara tersebut merupakan hal penting dan sangat esensial sehingga dengan komitmen bersama, kita semua dapat menjalankan tugas pokok, fungsi, dan peranan secara lebih efektif, demi mewujudkan kamtibmas yang terpelihara,” tukasnya.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan pemilu yang aman, damai, serta adil. Polri ingin pelaksana-

naan pemilu berjalan lancar, aman, dan damai, sehingga perlu dilaksanakan operasi Mantap Brata.

“Operasi ini dilancarkan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia,” jelasnya.

Dengan sasaran mengamankan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, mulai dari partai politik, calon perorangan, hingga kegiatan masyarakat.

“Operasi kepolisian akan dilaksanakan selama 222 hari terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2023. Kegiatan Operasi ini melibatkan instansi dan lembaga terkait dengan membentuk satgas premitif, preventif, gakkum, humas, dan satgas bantuan operasi,” tandasnya. (tin)





Rombongan Bupati Bulungan Saat Tiba di Kesultanan Tanjung Palas.

Festival Sungai Kayan Dipromosikan lewat Kalender Pariwisata

TANJUNGSSELOR - Peringatan Hari Jadi Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan berpusat di Kecamatan Tanjung Palas. Rangkaian kegiatan menyambut momen ini tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok.

Pada dasarnya, tradisi dan adat istiadat seperti Biduk Bebandung yang merupakan warisan dari para leluhur terus dilaksanakan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh sejarah panjang terbentuknya Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan.

Bupati Bulungan, Syarwani, menjelaskan bahwa tradisi Biduk Bebandung bukanlah hal baru yang baru dimulai hari ini. Ini adalah salah satu bentuk kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Kesultanan Bulungan ketika menerima tamu besar yang datang berkunjung ke Kesultanan Bulungan.

Oleh karena itu, dalam rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan tahun 2023, Biduk Bebandung diadakan sebagai bentuk apresiasi kita terhadap tradisi ini. Syarwani berharap agar acara Biduk Bebandung tetap diadakan di masa mendatang, terlepas dari siapa yang memimpin Kabupaten Bulungan di masa depan.

Syarwani menjelaskan bahwa perayaan Hari Jadi Bulungan dan Tanjung Selor tahun 2023 memiliki nuansa yang berbeda. Pemerintah daerah memfokuskan perayaan pada

Festival Sungai Kayan pada tahun ini. Pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022, pemerintah berfokus pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penyediaan panggung hiburan.

"Fokus kami pada tahun 2023 adalah bagaimana membuat Festival Sungai Kayan menjadi ikon wisata. Kami mendorong agar festival ini masuk dalam kalender pariwisata nasional dan telah mengusulkannya kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf)," ujarnya.

Usulan tersebut telah diajukan kepada pemerintah pusat melalui Ke-

menparekraf, dan Staf dari Kemenparekraf bahkan telah hadir dalam festival Sungai Kayan baru-baru ini.

"Pak Menteri telah memberikan ucapan selamat dalam testimoni yang disiarkan langsung melalui media sosial Pemkab Bulungan," tambahnya.

Pemerintah daerah sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Kemenparekraf dan berharap agar festival Sungai Kayan dapat diakui sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dipromosikan setiap tahun dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Bulungan. (tin)





Rapat bersama pengusaha dan nahkoda kapal terkait dengan dokumen perizinan dan pemeriksaan kapal di wilayah Kaltara.

Dokumen Tak Lengkap, Stasiun PSDKP Tarakan Amankan Puluhan Kapal Nelayan

TARAKAN - Sebanyak 16 kapal nelayan di wilayah perairan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tepatnya di sekitar Pulau Tarakan dan Pulau Bunyu, diamankan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarakan. Puluhan kapal itu diamankan lantaran tidak memiliki kelengkapan dokumen - dokumen perizinan, salah satunya Dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Penangkut Ikan (SIKPI).

Kepala Stasiun PSDKP Tarakan, Johanis Medea menuturkan bahwa penangkapan kapal nelayan ini merupakan upaya membantu dan mencari solusi persoalan di masyarakat khususnya nelayan pada saat melakukan penangkapan laut.

"Ini sebagai bentuk kehadiran kami, PSDKP tidak diam tapi membantu mencari solusi, dan kita dorong mereka (nelayan) tertib dan tertata, sehingga kemudian hari tidak ada persoalan atau konflik di lapangan," jelas Johanis, Selasa (10/10/2023) usai melaksanakan pertemuan dengan pemilik kapal dan nahkoda.

Dikatakannya, kapal nelayan yang diamankan semuanya akan diserahkan

ke provinsi yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltara. Untuk sanksi yang diberikan, akan diserahkan ke Provinsi.

"Sanksinya administrasi bukan sanksi pidana, ini kewenangan teman - teman di Provinsi maka kita limpahkan proses tindak lanjutnya. Mungkin sanksi teguran saja dan diarahkan mengurus kelengkapan dokumen apalagi ini nelayan kecil," tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Koordinasi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran PSDKP Tarakan, Abdul Harrisang mengatakan kapal yang diamankan semuanya tidak memiliki perizinan penangkapan ikan dan pengangkut ikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Iya semua tidak memiliki perizinan, pada tanggal 10 Oktober ini kita panggil pemilik kapal dan nahkoda untuk kita berikan pengarahan trus kita berikan informasi bahwa kapal penangkapan ikan wajib memiliki dokumen yang saya sebutkan tadi," terangnya.

Haris mengungkapkan saat ini informasi tentang perizinan penangkapan ikan sudah cukup banyak baik

di media massa maupun media sosial bahkan kegiatan sosialisasi juga sering dilakukan sehingga tidak ada alasan tidak mengetahui.

"Apalagi sekarang dengan peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tentang penangkapan ikan terukur itu kan saya rasa banyak yang sudah disosialisasikan," ungkapnya.

Namun sayangnya, di lapangan masih banyak ditemukan nelayan yang tidak memiliki dokumen perizinan yang lengkap. Pihaknya mengarahkan dan mengimbau agar segera mengurus perizinan ke Dinas Perikanan Provinsi Kaltara.

Dia mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan sejak awal 2023 ini. Dari hasil patroli tersebut, beberapa kapal sudah dilakukan pengamanan hingga BAP. Dia menegaskan jika kejadian ini masih berulang ditemukan di lapangan tentu akan ada sanksi administrasi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Terkait dengan perizinan ini yakita arahkan ke dinas perikanan provinsi untuk mendapatkan rekomendasi," pungkasnya. (APC)



Rilis Kodim 0907/Tarakan pengungkapan narkoba jenis sabu seberat 400 gram.

Tergiur Uang Rp30 Juta, Seorang Ibu Nekat Jadi Kurir Sabu

TARAKAN - Kodim 0907/Tarakan berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 400 gram. Barang haram tersebut diamankan dari seorang ibu berinisial SR, yang nekat menjadi kurir sabu lantaran dijanjikan uang sebesar Rp30 juta. Komandan Kodim 0907/Tarakan, Letkol Kav Jhon Budiman Christian Simarmata mengungkapkan, sabu yang dibawa SR diduga berasal dari Malaysia, yang diperkirakan nilainya mencapai Rp 200 juta.

Penyelundupan sabu ini berhasil digagalkan berkat informasi yang diterima Unit Intel Kodim Tarakan pada Rabu (11/10/2023).

"Pukul 10.20 Wita, Unit Intel Kodim 0907/Tarakan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada transaksi sabu di Pelabuhan Tengkeyu 1. Dengan waktu yang singkat, informasi dikembangkan, pukul 10.30 Wita, Unit intel menuju ke Pelabuhan Tengkeyu," ucapnya dalam rilis di Kantor Kodim 0907/Tarakan, Rabu (11/10/2023) sore.

Saat tiba di Pelabuhan Tengkeyu 1, sekira pukul 10.45 Wita, Unit Intel Kodim 0907/Tarakan melihat gerak gerik mencurigakan dari seorang ibu yang diduga membawa barang haram tersebut. "Kami amankan kemudian lakukan pengeledahan di dalam mobil dan mendapatkan 4 plastik diduga sabu dengan berat kurang lebih 400 gram," katanya.

Usai menemukan barang haram tersebut, terduga pelaku dan barang bukti dibawa menuju Kantor Kodim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil interogasi

singkat, diketahui bahwa pelaku dijanjikan upah sebesar Rp 30 juta dari seseorang yang berada di Nunukan jika berhasil membawa barang haram tersebut ke Tarakan.

"Yang bersangkutan dihubungi oleh seseorang yang berada di Kabupaten Nunukan untuk melakukan pekerjaan ini. Pelaku ditawarkan upah kurang lebih sebesar Rp 30 juta untuk membawa barang tersebut dari Kabupaten Nunukan menuju Tarakan," ungkapnya. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti diserahkan ke Polres Tarakan untuk pendalaman lebih lanjut. (APC)

